

**PENGARUH BELANJA MODAL TERHADAP KINERJA
KEUANGAN DAERAH DENGAN PENDAPATAN ASLI
DAERAH SEBAGAI VARIABEL INTERVENING PADA
KABUPATEN DAN KOTA DI PROVINSI JAWA TIMUR
TAHUN 2017-2019**



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I
pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis**

Oleh:

WINDA SEPTIA DWI P.
B 200170292

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2021**

HALAMAN PERSETUJUAN

**PENGARUH BELANJA MODAL TERHADAP KINERJA KEUANGAN DAERAH
DENGAN PENDAPATAN ASLI DAERAH SEBAGAI VARIABEL INTERVENING PADA
KABUPATEN DAN KOTA DI PROVINSI JAWA TIMUR
TAHUN 2017-2019**

PUBLIKASI ILMIAH

Oleh:

Winda Septia Dwi P.
B 200170292

Telah diperiksa dan disetujui oleh:
Dosen Pembimbing



Drs. Atwal Arifin, M.Si., Ak., CA
NIDN. 0609016002

HALAMAN PENGESAHAN

**PENGARUH BELANJA MODAL TERHADAP KINERJA KEUANGAN DAERAH
DENGAN PENDAPATAN ASLI DAERAH SEBAGAI VARIABEL INTERVENING
PADA KABUPATEN DAN KOTA DI PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2017-2019**

SKRIPSI


Disusun Oleh:

WINDA SEPTIA DWI PAMUNGKAS
B 200170291


Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada Hari Sabtu, 13 Februari 2021
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan penguji:

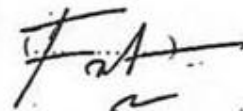
1. Drs. Atwal Arifin. M.Si., Ak., CA
(Ketua Dewan Penguji)
2. Drs. Yuli T.C., M.M., Ak
(Anggota I Dewan Penguji)
3. Dr. Fatchan A, S.E., M.Si
(Anggota II Dewan Penguji)



(.....)



(.....)



(.....)

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Surakarta



Prof. Dr. Anton Agus Suryawan, SE, M.Si
NIDN. 616087401

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam publikasi ilmiah ini tidak terdapat karya yang pernah disajikan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan saya diatas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 11 Februari 2021

Penulis



Winda Sertia Dwi P.

B 200170292

**PENGARUH BELANJA MODAL TERHADAP KINERJA KEUANGAN
DAERAH DENGAN PENDAPATAN ASLI DAERAH SEBAGAI
VARIABEL INTERVENING PADA KABUPATEN DAN KOTA DI
PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2017-2019**

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Daerah dengan Pendapatan Asli Daerah sebagai Variabel Intervening. Objek dalam penelitian ini adalah semua Kabupaten dan Kota di Jawa Timur. Data yang digunakan adalah data sekunder, yang bersumber dari laporan realisasi APBD secara lengkap di Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan pada tahun anggaran 2017-2019. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah purposive sampling dengan jumlah sampel 94 kabupaten dan kota. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Belanja Modal berpengaruh negatif terhadap Kinerja Keuangan Daerah, sedangkan secara tidak langsung Belanja Modal berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Daerah melalui Pendapatan Asli Daerah sebagai Variabel Intervening.

Kata kunci : Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah, Kinerja Keuangan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Abstract

This study aims to analyze the effect of Capital Expenditure on Regional Financial Performance with Regional Original Income as an Intervening Variable. The objects in this study are all districts and cities in East Java. The data used is secondary realization data, sourced from the complete APBD report at the Directorate General of Fiscal Balance in the 2017-2019 fiscal year. The sampling technique in this study was purposive sampling with a total sample of 94 districts and cities. The results of this study indicate that Capital Expenditures have a negative effect on Regional Financial Performance, while indirectly affect Regional Financial Performance through Regional Original Income as an Intervening Variable.

Keywords: Capital Expenditure, Regional Original Income, Financial Performance, Regional Revenue and Expenditure Budget

1. PENDAHULUAN

Otonomi daerah merupakan kebijakan yang diambil oleh pemerintah pusat agar pemerintah daerah dapat mengelola pemerintahannya sendiri tanpa campur tangan dari pemerintah pusat. Otonomi daerah diberlakukan sejak dikeluarkannya UU.

No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan UU No 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dengan Pemerintah Daerah. Dengan otonomi daerah, pemerintah daerah diharapkan semakin mandiri, mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat, baik dalam hal pembiayaan pembangunan maupun dalam hal pengelolaan keuangan daerah.

Dalam penelitian ini, yang dimaksudkan sebagai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah adalah tingkat pencapaian dari suatu hasil Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, yang meliputi anggaran dan realisasi PAD dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama satu periode anggaran. Kemampuan keuangan daerah dalam mengelola keuangan dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap pembiayaan pembangunan, dan pelayanan sosial masyarakat. Dalam penelitian ini untuk mengukur kinerja keuangan menggunakan ukuran kinerja yaitu rasio kemandirian.

Upaya dalam menggenjot belanja modal merupakan perkara yang sangat penting bagi pemerintah daerah karena dapat meningkatkan produktivitas perekonomian sehingga dapat mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat dan semakin besar alokasi belanja modal pada tahun selanjutnya. Hal ini akan memberi dampak yang baik terhadap pertumbuhan kinerja keuangan dari tahun ketahun secara terus-menerus. Suatu daerah untuk menambah aset tetap daerahnya dapat berupa pembangunan infrastruktur sebagai sarana untuk pelayanan publik, Maka pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja modal dalam anggaran pendapatan belanja daerahnya, Sehingga pemerintah daerah dapat melakukan pemungutan yang bersifat retribusi dan pajak atas infrastruktur yang telah dibangun untuk pelayan publik tersebut sebagai upaya dalam meningkatkan PAD.

PAD adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Halim, 2004:94). Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, karena melalui sektor ini dapat

dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerahnya sendiri. Pemerintah dapat menggenjot PAD melalui pungutan yang bersifat retribusi dan pajak atas infrastruktur yang telah dibangun untuk pelayan publik yang bersumber dari dana yang telah dialokasikan dalam bentuk anggaran belanja modal dalam APBD. Sehingga pemerintah daerah secara terus-menerus dapat memacu pertumbuhan kinerja keuangannya. Jumlah dan kenaikan kontribusi PAD akan sangat berperan dalam kemandirian pemerintah daerah yang dapat dikatakan sebagai kinerja pemerintah daerah (Florida, 2007).

Darwanis dan Saputra (2014) menghasilkan penelitian yang menyatakan bahwa Belanja modal secara signifikan berpengaruh positif secara langsung terhadap kinerja keuangan. Pengaruh pendapatan asli daerah terhadap kinerja keuangan adalah positif. Belanja modal secara parsial tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan namun belanja modal berpengaruh terhadap kinerja keuangan melalui pendapatan asli daerah. Penelitian yang dilakukan oleh Nugroho dan Rohman (2012) menghasilkan penelitian bahwa belanja modal secara signifikan berpengaruh negatif secara langsung terhadap pertumbuhan kinerja keuangan. Belanja modal secara signifikan berpengaruh positif secara tidak langsung terhadap pertumbuhan kinerja keuangan melalui pendapatan asli daerah. Penelitian sebelumnya oleh Puspitasari, Adiputra, dan Sulindawati (2015) menghasilkan penelitian tentang belanja modal secara signifikan mempengaruhi pertumbuhan kinerja keuangan. Belanja modal dapat berpengaruh langsung ke kinerja dan dapat juga berpengaruh tidak langsung yaitu belanja modal ke pendapatan asli daerah sebagai variabel intervening lalu ke pertumbuhan kinerja keuangan.

Penelitian ini mengacu pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Nugroho dan Rohman (2012) tentang pengaruh belanja modal terhadap pertumbuhan kinerja keuangan daerah dengan pendapatan asli daerah sebagai variabel intervening. Yang membedakan dengan penelitian sebelumnya adalah wilayah penelitian yaitu di Provinsi Jawa Timur dan tahun penelitian yaitu tahun 2017-2019.

2. METODE

Jenis Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yang menggunakan data sekunder

dengan melakukan uji hipotesis. Penelitian ini menggunakan variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai variabel intervening, Kinerja Keuangan Daerah sebagai variabel dependen serta Belanja Modal sebagai variabel independen yang bersumber dari data Laporan Realisasi APBD pada tahun 2017-2019. Metode yang digunakan untuk menganalisis hipotesis dalam penelitian ini adalah metode regresi sederhana dan analisa jalur (*path analysis*) dengan bantuan program SPSS.

2.1 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

2.1.1 Variabel Dependen dalam penelitian ini adalah Kinerja Keuangan Daerah. James B. Whittaker (1995) dalam Government Performance and Result Act, A Mandate for Strategic Planning and Performance Measurement menyatakan bahwa pengukuran/penilaian kinerja adalah suatu alat Manajemen untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas.

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran daerah dengan kuantitas dan kualitas yang terukur, kemampuan daerah dapat diukur dengan menilai efisiensi atas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat (Hendro Sumarjo, 2010). Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah adalah tingkat capaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi anggaran dan realisasi anggaran dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama periode anggaran. Penelitian ini menggunakan parameter rasio keuangan pemerintahan daerah dari hasil penelitian terdahulu, dan analisis Kinerja keuangan diproksikan ke rasio kemandirian.

2.1.2 Variabel Independen

Menurut PP Nomor 71 Tahun 2010, tentang Standart Akuntansi Pemerintah yang menyatakan bahwa belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Belanja Modal = Belanja Tanah + Belanja Peralatan dan Mesin + Belanja Gedung dan Bangunan + Belanja Jalan, Irigrasi, dan Jaringan + Belanja Aset Tetap Lainnya.

2.1.3 Variabel Intervening

Menurut UU No. 33 Tahun 2004, Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber di dalam daerahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber penerimaan daerah asli yang digali di daerah tersebut untuk digunakan sebagai modal dasar pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan usaha-usaha daerah untuk memperkecil ketergantungan dana dari pemerintah pusat.

PAD = Pajak Daerah + Retribusi Daerah + Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan + Lain-lain PAD yang Sah.

2.2 Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis jalur (path analysis). Analisis jalur merupakan perluasan dari analisis regresi linear. Jalur path analysis ini untuk menguji pengaruh masing-masing variabel independen terhadap dependen secara simultan. Dimana persamaan regresinya adalah sebagai berikut:

$$PAD = p_1BM + e_1 \quad (1)$$

$$PKK = p_1BM + p_2PAD + e_2 \quad (2)$$

Keterangan :

BM = Belanja Modal

PAD = Pendapatan Asli Daerah

PKK = Pertumbuhan Kinerja Keuangan

p1, p2 = Koefisien Jalur

e1, e2 = Variabel Residu

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Uji Asumsi Klasik

3.1.1 Uji Normalitas

Berdasarkan hasil uji normalitas dengan Kolmogorov Smirnov adalah 1,203 dengan nilai Asymp.Sig 0,111 yang lebih dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan data yang digunakan dalam penelitian ini terdistribusi normal.

3.1.2 Uji Multikolinearitas

Nilai VIF pada hasil uji multikolinearitas model regresi untuk semua variabel independennya kurang dari 10 dan nilai tolerance lebih dari 0,1 atau 10%. Dengan demikian, dapat dibuktikan bahwa pada model regresi tidak terdapat gejala multikolinearitas.

3.1.3 Uji Heterokedastisitas

Pengujian heterokedastisitas dalam penelitian ini menggunakan uji glejser. Berdasarkan hasil uji glejser yang dilakukan, nilai probabilitas menunjukkan lebih besar dari 0,05 maka diketahui bahwa tidak ada hubungan antara variabel bebas dengan nilai mutlak residual sehingga menunjukkan tidak adanya masalah heterokedastisitas dalam model regresi.

3.1.4 Uji Autokorelasi

Hasil uji autokorelasi yang diperoleh nilai Durbin Watson pada model regresi I sebesar 1,883 menunjukkan bahwa nilai Durbin-Watson model regresi I berada diantara -2 dan 2, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak terjadi autokorelasi.

3.2 Uji Hipotesis

3.2.1 Uji Regresi Linier Sederhana

Tabel 1. Hasil Uji Analisis Regresi Linier Sederhana

Model Regresi	Koefisien Reg Tak Terstandar		
	Constanta	BM	PAD
1	35.615,615	0,873	-
2	0,211	-1,364	1,335

Berdasarkan data tabel IV.10 diatas dibuat persamaan regresi sebagai berikut:

a. Persamaan Regresi I

$$PAD = 35.615,615 + 0,873 BM + e$$

b. Persamaan Regresi II

$$KKD = 0,211 - 1,364 BM + 1,335PAD + e$$

3.2.2 Uji Kelayakan Model (Uji F)

Tabel 2. Uji F

Model	Variabel	F Hitung	Sig	Keterangan
1	BM	21,306	0,000	Signifikan
2	BM, PAD	6,792	0,002	Signifikan

Berdasarkan Tabel 2 hasil dari uji F dalam model regresi yang pertama diperoleh F hitung sebesar 21,306 dengan nilai signifikansi 0,000 kurang dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa model dalam penelitian ini adalah fit. Hal ini menunjukkan bahwa Belanja Modal dalam penelitian ini secara bersama-sama berpengaruh terhadap tingkat Pendapatan Asli Daerah.

Sedangkan untuk hasil uji F model regresi yang kedua diperoleh nilai F hitung sebesar 6,792 dengan nilai signifikansi 0,002 kurang dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa model penelitian ini adalah fit. Hal ini menunjukkan bahwa belanja modal, pendapatan asli daerah secara bersama- sama berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah.

3.2.3 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 3. Hasil Koefisien Determinasi (R^2)

Model	Regresi	R Square
1	BM => PAD	0,179
2	BM, PAD => KKD	0,111

Berdasarkan tabel IV.12 diatas dapat diketahui bahwa:

1. Dalam model regresi pertama, 17,9% variabel PAD dijelaskan oleh Belanja Modal sedangkan sisanya yaitu sebesar 82,1% dijelaskan oleh variabel lain diluar metode penelitian.
2. Dalam model regresi kedua, 11,1% variabel Kinerja Keuangan Daerah dijelaskan oleh variabel Belanja Modal sedangkan sisanya yaitu sebesar 88,9% dijelaskan oleh variabel lain diluar metode penelitian.

3.2.4 Uji t

Berdasarkan tabel IV.11 maka dapat diperoleh hasil sebagai berikut:

- a. Hasil Hipotesis Pertama

Untuk membuktikan hipotesis pertama dalam penelitian ini menggunakan model regresi pertama. Berdasarkan hasil uji t pada tabel IV.11 diketahui bahwa Belanja Modal mempunyai t_{hitung} sebesar 4,616 lebih besar dari 1,96 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari nilai signifikansi 0,05. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa Belanja Modal berpengaruh dan secara statistic signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah, maka H1 diterima.

b. Hasil Hipotesis Kedua

Pengujian Hipotesis kedua ini untuk menguji efek mediasi dari variabel PAD terhadap hubungan belanja modal dengan kinerja keuangan daerah, untuk mengetahui efek mediasi tersebut, akan dihitung pengaruh tidak langsung variabel independen terhadap variabel dependen. Pengaruh koefisien langsung dapat dilihat dari koefisien beta masing-masing model regresi. Pengaruh tidak langsung belanja modal dengan kinerja keuangan daerah sebagai berikut:

- 1) Koefisien Beta Belanja Modal terhadap PAD = 0,873
- 2) Koefisien Beta PAD terhadap Kinerja Keuangan Daerah = 1,335

Jadi pengaruh tidak langsung Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Daerah dapat dihitung sebagai berikut: Pengaruh tidak langsung = $0,873 \times 1,335 = 1,166$

Oleh karena itu pengaruh tidak langsung sebesar 1,166 lebih besar dari pengaruh langsung sebesar -0,019. Maka dapat disimpulkan bahwa PAD memediasi pengaruh belanja modal terhadap kinerja keuangan daerah, maka H2 diterima.

Tabel 4. Hasil Uji t

Variabel	Unstandardized Coefficient	T _{hitung}	Signifikan	Keterangan
	B			
Belanja Modal	0,873	4,616	0,000	H1 diterima
PAD	1,335	3,392	0,000	H1 diterima

3.3 Pembahasan

3.3.1 Pengaruh Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Daerah

Adapun hasil pengujian t dari variabel Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Daerah adalah -0,172 dengan nilai signifikan 0,000 lebih kecil dari nilai signifikan 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa belanja modal berpengaruh terhadap tingkat kinerja keuangan daerah, yang artinya H1 diterima. Selain itu *original sample* sebesar -1,364 menunjukkan bahwa pengaruh Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Daerah adalah negatif, sehingga dapat disimpulkan bahwa apabila belanja modal suatu daerah tinggi, menunjukkan bahwa kinerja keuangan daerah yang rendah. Hasil ini dapat dijelaskan bahwa belanja modal mempunyai dampak yang signifikan dan negatif terhadap kemandirian keuangan daerah, tetapi belanja modal yang terjadi masih kurang merata atau rendah sehingga banyak ketimpangan tingkat pertumbuhan kinerja keuangan daerah. Hasil ini mendukung Penelitian yang dilakukan oleh Nugroho dan Rohman (2012) mengenai Pengaruh pengeluaran modal terhadap kinerja keuangan daerah dengan pendapatan asli daerah sebagai variabel intervening. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pengeluaran modal berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan daerah secara langsung.

3.3.2 Pengaruh Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Daerah melalui Pendapatan Asli Daerah sebagai Variabel Intervening

Pengaruh koefien langsung dapat dilihat dari koefisien beta masing-masing model regresi. Pengaruh langsung belanja modal terhadap kinerja keuangan daerah sebesar -1,364. Sedangkan pengaruh tidak langsung dapat dihitung dari Koefisien Beta Belanja Modal terhadap PAD \times Koefisien Beta PAD terhadap Kinerja Keuangan Daerah yaitu sebesar $0,873 \times 1,335 = 1,166$. Oleh karena itu pengaruh tidak langsung sebesar 1,166 lebih besar dari pengaruh langsung sebesar -1,364. Maka dapat disimpulkan bahwa PAD memediasi pengaruh Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Daerah. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nugroho dan Rohman (2012) yang menunjukkan bahwa PAD dapat memediasi pengaruh belanja modal terhadap kinerja keuangan daerah.

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan pada bab sebelumnya mengenai hasil pengujian hipotesis,

dengan sampel yang berjumlah 94 Kabupaten dan Kota di Jawa Timur tahun 2017-2019 diperoleh simpulan sebagai berikut:

- a. H₁ Diterima. Didapatkan hasil penelitian Belanja Modal berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Daerah.
- b. H₂ Diterima. Didapatkan hasil penelitian Belanja Modal berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Daerah dengan Pendapatan Asli Daerah sebagai variabel Intervening.

4.2 Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan dalam penelitian ini, antara lain sebagai berikut :

- a. Dalam penelitian ini, peneliti hanya mengambil satu variabel independen yaitu Kinerja Keuangan Daerah, yang hanya menggunakan satu rasio pengukuran yaitu rasio kemandirian, sehingga penelitiannya kurang lengkap, pada uji Koefisien Determinasi kurang bervariasi variabelnya atau penelitiannya kurang luas.
- b. Tahun penelitian yang dipakai dalam penelitian ini hanya pada tahun 2017-2019 sehingga kesimpulan kurang berlaku umum.

4.3 Saran

- a. Melihat variabel independen yaitu Kinerja Keuangan Daerah yang hanya diukur dengan menggunakan satu rasio yaitu rasio kemandirian dalam penelitian ini, maka diharapkan dalam penelitian selanjutnya untuk menambahkan rasio-rasio pengukuran yang lainnya, untuk mengukur kinerja keuangan daerah dapat menggunakan atau menambahkan rasio-rasio pengukuran yang lainnya seperti rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio keserasian, ataupun rasio pertumbuhan.
- b. Penelitian ini hanya menggunakan tahun penelitian pada tahun 2017-2019 , maka saran untuk penelitian berikutnya diharapkan dapat menambah periode tahun penelitiannya.

DAFTAR PUSTAKA

Amrozi, Imam Akhmad. 2016. *Pengaruh Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Kinerja Keuangan Daerah dengan Pendapatan Asli Daerah Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus di Provinsi Jawa Timur)*. Vol I, No 1. ISSN 2502-3764.

- Andirfa, M., Basri, H., & A. Majid, M. S. 2016. *Pengaruh Belanja Modal, Dana Perimbangan Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Kabupaten Dan Kota Provinsi Aceh*. Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala, 5, 30-38.
- Andirfa, Mulia, dkk. 2016. *Pengaruh Belanja Modal, Dana Perimbangan Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Kabupaten dan Kota di Provinsi Aceh*. Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala, Vol. 5, No. 3.p: 30-38. ISSN 2302-0164.
- Darwanis dan Saputra. 2014. *Pengaruh Belanja Modal terhadap Pendapatan Asli Daerah dan Dampaknya Pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Aceh)*. Jurnal Dinamika dan Bisnis, Vol. 1, No. 2, 183.
- Gerungan, dkk. (2014) *Pengaruh Kinerja Keuangan Kabupaten/Kota Terhadap Alokasi Belanja Modal Di Provinsi Sulawesi Utara*. Jurnal Publikasi.
- Ghozali, Imam. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 19*. Edisi Kelima. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro Kepmendagri No.690.900-327,1996.
- Halim, Abdul. 2004. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, Abdul. 2007. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, Abdul. 2014. *Manajemen Keuangan Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Kawedar, Rohman dan Handayani. 2007. *Akuntansi Sektor Publik*. Semarang: Widya Karya.
- Mahsun, Mohamad, 2006. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFY-Yogyakarta.
- Mahsun, Sulistiyowati dan Purwanugraha. 2006. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFY Yogyakarta.
- Nugroho, Fajar dan Abdul Rohman. 2012. *Pengaruh Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Kinerja Keuangan Daerah dengan Pendapatan Asli Daerah Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus di Provinsi Jawa Tengah)*. Jurnal Akuntansi Diponegoro, Vol I, No 2.
- Nugroho, Fajar dan Abdul Rohman. 2012. *Pengaruh Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Kinerja Keuangan Daerah Dengan Pendapatan Asli Daerah Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Di Propinsi Jawa Tengah)*. Skripsi Sarjana. FEB Universitas Diponegoro. Semarang.
- Puspitasari, Adiputra, dan Sulindawati. 2015. *Pengaruh Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Kinerja Keuangan Daerah dengan Pendapatan Asli Daerah Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus di Kabupaten Buleleng)*. Jurnal Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha, Vol 3, No 1 Tahun 2015.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Undang-Undang No 13 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dengan Pemerintah Daerah.